

IDENTIFIKASI KAWASAN PENGEMBANGAN JERUK DAN RESPONS PETANI TERHADAP PENUMBUHAN KOPERASI DI KABUPATEN REJANG LEBONG BENGKULU

Identification of Citrus Development Area and Farmers' Response on Cooperative Formation in Rejang Lebong Regency Bengkulu

Andi Ishak^{1)✉}, Emlan Fauzi²⁾, Erpan Ramon³⁾, Herlena Bidi Astuti⁴⁾, Darkam
Musaddad⁵⁾

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, Badan Litbang Kementan
Email: erhr94@yahoo.co.id

ABSTRACT

Farmer cooperatives are legal entities whose existence is very important to increase the bargaining position of farmers in the agribusiness system on an agricultural commodity development area. This study aims to identify the citrus development area and analyze farmers' responses to cooperative formation in citrus development area in Rejang Lebong Regency. The study was conducted from February to April 2019 with primary data collection through interviews and surveys and supported by secondary data. Interviews were conducted to identify areas of citrus development. While the data collected in the survey are farmer characteristics (age, formal education, non-formal education, number of family dependents, area of garden ownership) and farmers' responses to cooperative. The farmers' response variable is a response to the cooperatives formation, cooperative forms, cooperative membership, service time, and cooperative management, which are measured using a Likert scale. Data analysis was carried out descriptively and inferentially using Spearman Rank correlation. This study concluded that the citrus development area in Rejang Lebong Regency was in accordance with the Decree of the Rejang Lebong Regent Number 180.60. II Year 2018 which meets the requirements of Minister of Agriculture Regulation 18/2018 is only in Pal 7 Village, Bermani Ulu Raya Subdistrict. The citrus farmer's response to the cooperative formation is positive. The response was significantly positively related to the area of garden ownership.

Keywords: *citrus, development area, response, cooperatives.*

ABSTRAK

Koperasi petani merupakan organisasi berbadan hukum yang keberadaannya sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis pada suatu kawasan pengembangan komoditas pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kawasan pengembangan jeruk dan menganalisis respons petani terhadap penumbuhan koperasi pada kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2019 dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan survei serta didukung dengan data sekunder. Wawancara dilakukan untuk mengidentifikasi kawasan pengembangan jeruk. Sementara data yang dikumpulkan dalam survei adalah karakteristik petani (umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah tanggungan keluarga, luas kepemilikan kebun) dan respons petani terhadap penumbuhan koperasi. Variabel respons petani adalah respons terhadap penumbuhan koperasi, bentuk koperasi, keanggotaan koperasi, waktu pelayanan, dan pengelolaan koperasi, yang diukur menggunakan skala Likert. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan korelasi Rank Spearman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60. II Tahun 2018 yang telah memenuhi ketentuan Permentan 18/2018 hanya ada di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Respons petani jeruk di Desa Pal 7 terhadap penumbuhan koperasi adalah positif. Respons tersebut berhubungan positif secara signifikan dengan luas kepemilikan kebun.

Kata kunci: jeruk, kawasan pengembangan, respons, koperasi.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan kawasan pertanian merupakan salah satu kebijakan umum Kementerian Pertanian pada Kabinet Kerja 2014-2019. Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati yang disesuaikan dengan potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi petani, dan ketentuan tata ruang wilayah (Kementan, 2015).

Pengembangan kawasan pertanian telah diatur di dalam Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Berbasis Korporasi Petani. Kawasan pertanian tersebut merupakan gabungan sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan, serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumberdaya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. Oleh karena itu, terdapat batas minimal (luas lahan pertanian

maupun jumlah ternak) yang dipersyaratkan di dalam penetapan kawasan pertanian itu. Kawasan pertanian perlu didukung dengan kelembagaan agribisnis petani dalam bentuk korporasi petani.

Keberadaan korporasi petani sangat penting. Korporasi petani yaitu organisasi petani berbadan hukum yang berada pada suatu kawasan pertanian diharapkan mampu mensinergikan sistem dan usaha agribisnis untuk meningkatkan efisiensi sistem budidaya, pengolahan, distribusi, dan pemasaran dalam rangka memperkuat posisi tawar dan kesejahteraan petani serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah (Kementan, 2018a). Oleh karena itu, pengembangan kawasan komoditas pertanian tidak akan efektif jika tidak dipadukan dengan penguatan organisasi petani berbasis korporasi.

Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan Kementerian Pertanian di Provinsi Bengkulu yang kawasan pengembangannya ditetapkan di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Kepmentan 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional (Kementan, 2018b). Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan lima kecamatan sebagai kawasan pengembangan jeruk berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60.II Tahun 2018 yaitu Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, dan Sindang Dataran (Pemkab Rejang Lebong, 2018). Sistem dan usaha agribisnis dalam kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong memerlukan organisasi petani yang kuat. Koperasi petani merupakan salah satu alternatif bentuk organisasi yang dapat ditumbuhkembangkan.

Keberadaan koperasi dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian di pedesaan karena berbagai keunggulannya. Koperasi mampu meningkatkan posisi tawar petani (Agustia et al., 2017), mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan menekan biaya transaksi usaha (Aini et al., 2016), berdampak positif terhadap harga produk pertanian (Ariningsih, 2014), menjalin kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan usaha (Rangkuti, 2010; Patricia dan Sari, 2018), memiliki sistem manajemen organisasi yang lebih baik dalam pengembangan usaha produktif (Listyati et al., 2014), menjadi sumber permodalan dan informasi bagi petani (Ngadi, 2013), serta mampu mengembangkan potensi agribisnis (Susilo, 2013).

Di sisi lain, berbagai permasalahan masih melingkupi pengembangan koperasi di pedesaan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah efisiensi manajemen koperasi masih rendah (Ariningsih, 2013; Patricia dan Sari, 2018; Fitriani, 2015), kurangnya kesadaran dan pemahaman anggota tentang berkoperasi (Pratama et al., 2017), rendahnya kemandirian koperasi (Rangkuti, 2010), dan kurangnya pendampingan dalam pemberdayaan koperasi (Sulaiman et al., 2016).

Pengembangan koperasi pertanian di Indonesia sudah berlangsung lama. Koperasi pertanian tumbuh sangat masif pada era Orde Baru yang diinisiasi pemerintah lewat Koperasi Unit Desa (KUD). Tujuannya untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional (Susilo, 2013). Namun usaha KUD sebagai koperasi pertanian masih terbatas pada subsistem usahatani yang memiliki nilai tambah rendah yaitu hanya 8-12% dalam sistem agribisnis, sedangkan pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi tidak ditanganinya (Widjajani dan Hidayati, 2014).

Permasalahan koperasi terkait dengan dua hal yaitu lemahnya manajemen organisasi dan manajemen usaha yang saling berkelindan (Sitepu dan Hasyim, 2018). Permasalahan manajemen organisasi diantaranya adalah pembagian tugas pengurus dan manajer yang masih tumpang tindih, rendahnya kemandirian koperasi, kemampuan memupuk modal dari anggota yang masih terbatas, kemitraan dengan lembaga lain belum optimal, dan program pemberdayaan koperasi masih rendah. Tidak mengherankan jika pada tahun 2017, dari 212.135 unit koperasi di seluruh Indonesia, hanya 150.223 unit (70,81%) yang aktif. Selain itu, tidak sedikit koperasi yang aktif itu dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nilai-nilai koperasi dan perundang-undangan yang berlaku (Kemenkop dan UKM, 2017).

Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan peranan koperasi terhadap perekonomian nasional masih sangat kecil. Zain (2015) mengungkapkan bahwa kepemilikan aset seluruh koperasi di Indonesia hanya 0,8%, sangat jauh dibandingkan dengan aset perusahaan negara (53,8%) dan perusahaan swasta (45,4%). Nilai usaha koperasi secara nasional juga sangat kecil yaitu hanya mencapai 4%, sedangkan perusahaan swasta 61,7% dan perusahaan negara 34,3%.

Kecilnya peranan koperasi terhadap perekonomian nasional tidak lepas dari minat berkoperasi masyarakat masih rendah. Padahal banyak kegiatan usaha produktif dapat dikembangkan di dalam wadah koperasi. Adanya faktor perekat yaitu kesamaan kepentingan ekonomi dan ikatan-ikatan sosial di dalam masyarakat pedesaan misalnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan koperasi. Namun kurangnya pengetahuan petani terhadap manfaat koperasi, keterbatasan waktu untuk terlibat aktif dalam koperasi, kemampuan manajemen organisasi yang rendah, dan kurangnya pendampingan pemerintah, menyebabkan petani enggan berkoperasi (Fatimah dan Darna, 2011). Oleh karena itu, penumbuhan koperasi pada suatu wilayah pengembangan komoditas pertanian menjadi sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis. Namun di sisi lain, penumbuhan koperasi tersebut relatif tidak mudah dilakukan tanpa dukungan petani sebagai calon anggotanya.

Di dalam konteks penumbuhan koperasi pada kawasan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diperhatikan dua hal. Pertama, dimana letak kawasan pengembangan jeruk yang telah memenuhi kriteria Permentan 18/2018 dengan luas minimal pertanaman 25 hektar pada lima kecamatan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60. II Tahun 2018; Kedua, bagaimana respons petani untuk berkoperasi pada kawasan pengembangan jeruk tersebut. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong dan (2) menganalisis respons petani terhadap penumbuhan koperasi pada kawasan pengembangan jeruk tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong pada bulan Februari sampai dengan April 2019. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan survei yang didukung dengan data sekunder dari laporan Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong.

Wawancara melibatkan 13 orang informan yaitu 1 orang pengawas benih tanaman pangan dan hortikultura, 5 orang Koordinator Penyuluh pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di lima kecamatan kawasan pengembangan jeruk, dan 7 orang ketua kelompok tani jeruk di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Tujuan wawancara adalah untuk mengidentifikasi luas pertanaman jeruk dan penyebarannya dalam kawasan pengembangan di Kabupaten Rejang Lebong.

Survei terhadap 31 orang petani jeruk dilakukan pada kawasan pengembangan yang telah sesuai dengan Permentan 18/2018 (pertanaman jeruk membentuk satu kawasan > 25 ha). Pelaksanaan survei didahului dengan sosialisasi atau penyuluhan koperasi kepada petani. Data yang dikumpulkan dalam survei adalah karakteristik petani (umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah tanggungan keluarga, dan luas kepemilikan kebun) dan respons petani terhadap koperasi. Respons petani diukur secara kualitatif dengan skala Likert (sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju). Variabel yang diukur adalah respons petani terhadap penumbuhan koperasi, bentuk koperasi, keanggotaan koperasi, waktu pelayanan, dan pengelolaan koperasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Penentuan kawasan pengembangan jeruk dianalisis secara deskriptif mengacu pada: (1) syarat luas kawasan pengembangan sesuai dengan Permentan 18/2018 (minimal 25 ha), (2) penetapan lokasi kawasan pengembangan sesuai dengan Kepmentan 472/2018 (salah satu kawasan jeruk nasional terletak di Kabupaten Rejang Lebong), dan (3) penetapan kawasan pengembangan jeruk pada 5 kecamatan (Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Sindang Dataran, Sindang Kelingi, dan Selupu Rejang) sesuai SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60.II

Tahun 2018. Selanjutnya dilakukan penelusuran pada 5 kecamatan kawasan pengembangan melalui wawancara dengan informan untuk menentukan kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong yang telah memenuhi syarat minimal luas kawasan.

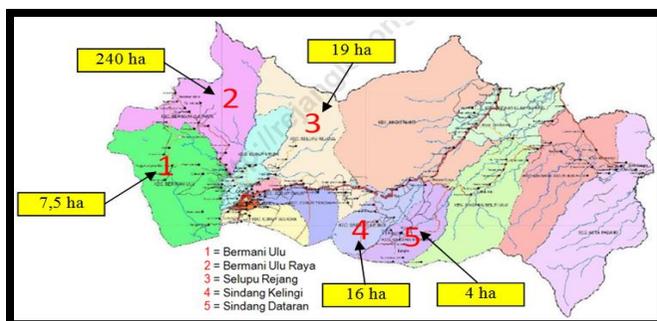
Respons petani terhadap penumbuhan koperasi pada kawasan pengembangan jeruk dianalisis secara deskriptif dengan menghitung persentasi respons positif (sangat setuju dan setuju), netral (ragu-ragu), dan negatif (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Selanjutnya, hubungan antara respons petani terhadap penumbuhan koperasi dengan karakteristik petani dianalisis dengan menggunakan korelasi Rank Spearman (uji 2 arah pada $\alpha = 5\%$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan Pengembangan Jeruk di Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Wilayahnya terletak di sepanjang lereng Pegunungan Bukit Barisan dengan luas wilayah 151.576 ha yang terbagi atas 15 kecamatan. Letaknya pada wilayah perbukitan menyebabkan elevasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong sangat beragam dari datar sampai bergunung yang didominasi oleh dataran sedang sampai tinggi seluas 105.014 ha (69,28%). Ketinggian tempatnya menyebabkan daerah ini bersuhu sejuk dan cocok untuk budidaya berbagai jenis tanaman perkebunan dan hortikultura dataran tinggi, diantaranya jeruk RGL.

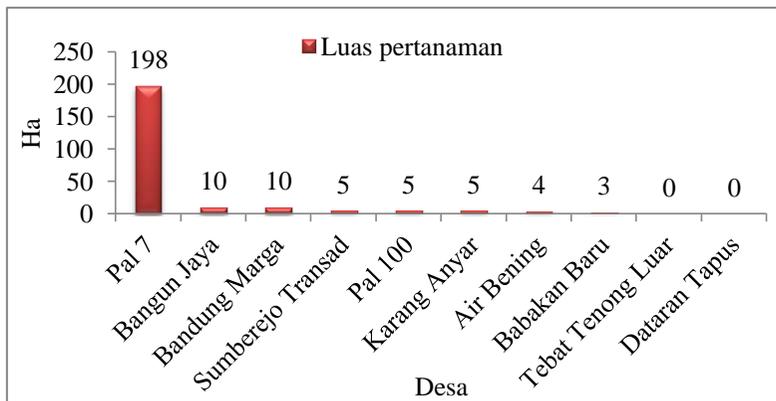
Terdapat 5 kecamatan sebagai kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60. II Tahun 2018. Kelima kecamatan tersebut adalah Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, dan Sindang Dataran. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan melalui wawancara dan observasi lapangan, luas pertanaman jeruk pada kawasan pengembangan di 5 kecamatan tersebut diperkirakan seluas 286,5 ha. Hanya Kecamatan Bermani Ulu Raya yang telah membentuk kawasan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong dengan luas pertanaman sekitar 240 ha (Gambar 1).



Gambar 1. Luas pertanaman jeruk pada lima kecamatan kawasan pengembangan di Kabupaten Rejang Lebong

Kecamatan Bermani Ulu Raya merupakan pionir dalam pengembangan jeruk keprok varietas RGL di Kabupaten Rejang Lebong. Luas Kecamatan Bermani Ulu Raya 14.636 hektar, 8.992 ha (61,44%) diantaranya merupakan dataran tinggi yang cocok untuk pertanaman jeruk RGL. Sesuai dengan sifatnya, jeruk RGL beradaptasi baik pada dataran sedang sampai tinggi dengan ketinggian 900-2.100 mdpl dan memiliki keunggulan dapat berbuah sepanjang tahun (Kementan, 2012).

Kecamatan Bermani Ulu Raya terbagi atas 10 desa, 8 desa diantaranya telah memiliki pertanaman jeruk. Desa Pal 7 merupakan wilayah yang pertanaman jeruknya terluas yaitu 198 ha dari 240 hektar luas pertanaman jeruk di Kecamatan Bermani Ulu Raya (Gambar 2). Oleh karena itu, Desa Pal 7 merupakan satu-satunya wilayah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kawasan pengembangan jeruk sesuai dengan Permentan 18/2018.



Gambar 2. Sebaran luas pertanaman jeruk di Kecamatan Bermani Ulu Raya.

Petani di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya mulai menanam jeruk sejak tahun 2014. Petani di desa ini tertarik menanam jeruk setelah melihat keberhasilan petani jeruk kabupaten tetangga yaitu di Desa Rimbo Pengadang, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong. Letak Desa Pal 7 tidak jauh dengan Desa Rimbo Pengadang (± 5 km) sehingga informasi tentang keberhasilan petani menanam jeruk di Desa Rimbo Pengadang telah diketahui oleh petani di Desa Pal 7.

Pertanaman jeruk di Desa Pal 7 mulai berproduksi pada tahun 2016. Keberhasilan petani jeruk di Desa Pal 7 mendorong Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memprogramkan perluasan pertanaman jeruk. Pemda telah bekerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Pertanian pada tahun 2017 untuk mendapatkan benih jeruk RGL dari Balai Penelitian Jeruk dan Tanaman Buah Subtropika (Balitjestro) Badan Litbang Pertanian. Pada tahun 2018,

Balitjestro telah menyalurkan bantuan benih jeruk sebanyak 24.000 batang kepada 11 kelompok tani yang tersebar pada 6 desa di 3 kecamatan (Tabel 1).

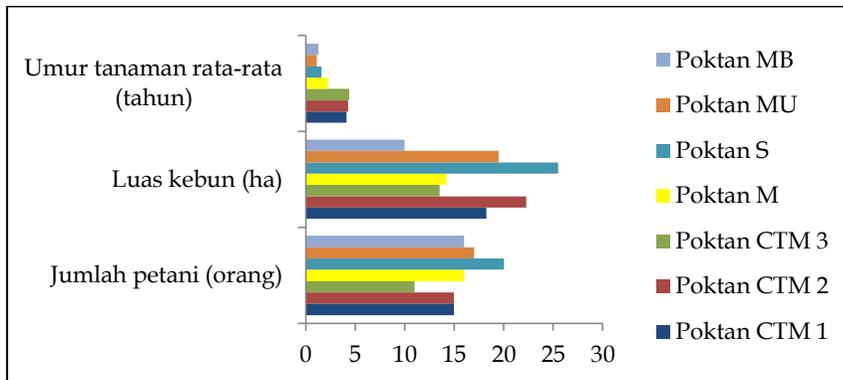
Tabel 1. Kelompok tani jeruk di Kabupaten Rejang Lebong penerima bantuan Benih jeruk RGL dari Balitjestro Badan Litbang Pertanian.

No.	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah bibit (batang)
1.	Bermani Ulu Raya	2	6	18.500*
2.	Selupu Rejang	2	2	2.000
3.	Sindang Kelingi	2	3	3.500
Jumlah		6	11	24.000

* Bantuan benih di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya sebanyak 17.000 batang.

Sumber: Laporan distribusi benih jeruk Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018.

Budidaya jeruk di Desa Pal 7 dimulai secara swadaya. Budidaya jeruk di Desa Pal 7 pada saat ini diusahakan oleh 110 orang petani dari 7 kelompok tani dengan total luas kebun 123,3 ha. Pertanaman jeruk seluas 74,7 ha lainnya diusahakan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Budidaya jeruk mulai dilakukan oleh petani dari 4 kelompok tani (Poktan CTM 1, 2, 3, dan M) pada tahun 2014 yang pada saat ini telah menghasilkan. Sementara itu, pertanaman jeruk pada 3 kelompok tani lainnya (Poktan S, MU, dan MB) didorong oleh pemerintah melalui bantuan benih pada tahun 2018 dan belum menghasilkan (Gambar 3).



Gambar 3. Jumlah petani, luas kebun, dan umur tanaman jeruk pada setiap kelompok tani di Desa Pal 7.

Pengembangan kawasan jeruk di Desa Pal 7 menunjukkan bahwa keswadayaan petani telah berhasil membentuk kawasan pertanian. Tumbuhnya kawasan ini menarik pemerintah melakukan program ekstensifikasi jeruk yang dibuktikan dengan adanya bantuan benih sebanyak

24.000 batang pada tahun 2018, 17.000 batang diantaranya (70,73%) disalurkan ke Desa Pal 7.

Karakteristik Petani Jeruk di Desa Pal 7

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008), karakteristik secara etimologis berarti “mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu”. Dengan pengertian ini dapat dijelaskan bahwa karakteristik petani adalah sifat-sifat khas seorang petani yang membedakannya dengan petani lain. Karakteristik petani merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilakunya (Ellyta, 2017).

Karakteristik petani diidentifikasi dari hasil survei terhadap 31 orang petani jeruk di Desa Pal 7 yang merupakan kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong. Lima variabel karakteristik petani meliputi umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, jumlah tanggungan keluarga, dan luas kepemilikan kebun disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik petani jeruk di Desa Pal 7.

No.	Karakteristik petani	Keterangan		
		Minimum	Maksimum	Rata-rata
1.	Umur (tahun)	23	72	42
2.	Pendidikan formal (tahun)	4	12	10
3.	Pendidikan non formal (kali)	0	5	2
4.	Jumlah tanggungan keluarga (orang)	0	6	3
5.	Luas kepemilikan kebun (ha)	0,5	3,0	1,4

Sumber: Hasil survei terhadap 31 orang petani.

Petani yang membudidayakan jeruk di Desa Pal 7 memiliki rentang umur sangat lebar antar 23-72 tahun dengan rata-rata 42 tahun. Ini mengindikasikan bahwa budidaya jeruk menarik bagi semua lapisan umur petani baik usia produktif maupun tidak produktif. Usia produktif adalah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun (Rusli, 2012). Rentang usia produktif ini juga digunakan oleh Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4).

Pendidikan formal merupakan salah satu indikator karakteristik petani yang penting dianalisis. Sebagian besar petani di Indonesia memiliki tingkat pendidikan SD ke bawah, yaitu sebanyak 64%. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak langsung rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian (Susilowati, 2016). Tabel 2 memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal petani responden di Desa Pal 7 adalah 10 tahun (kelas 1 SMA), relatif lebih baik daripada tingkat pendidikan petani rata-rata nasional. Tingkat pendidikan ini juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata tingkat

pendidikan formal penduduk usia produktif di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 yaitu 8,29 tahun atau hanya mencapai kelas 2 SMP (Sudarwati, 2016).

Tingkat pendidikan formal bukan menjadi tolok ukur utama yang akan meningkatkan pengetahuan petani jeruk karena pengetahuan teknis budidaya jeruk tidak diperoleh petani dari pendidikan formal namun dari pendidikan non formal sebagai hasil penyuluhan. Hal ini karena penyuluhan berfungsi sangat penting dalam penyebarluasan informasi ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi serta penerangan kepada petani lewat pendidikan non formal (Mardikanto, 2009). Rata-rata petani responden baru mengikuti proses penyuluhan tentang budidaya jeruk sebanyak 2 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluhan bagi petani jeruk pada kawasan pengembangan di Kabupaten Rejang Lebong masih belum intensif. Oleh karena itu, peranan penyuluhan perlu lebih diintensifkan.

Jumlah tanggungan keluarga petani jeruk dan luas lahan kebun yang ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan potensi pengembangan ke depan harus dilakukan secara intensif dengan manajemen kebun yang baik. Jumlah tenaga kerja dari dalam keluarga yang sangat terbatas untuk mengurus kebun yang relatif luas (rata-rata 1,4 ha) menyebabkan petani harus memiliki modal yang relatif besar untuk biaya upah tenaga kerja dan pembelian sarana produksi.

Jeruk RGL yang memiliki keunggulan dapat berbuah sepanjang tahun, jika tidak dikelola dengan baik tidak akan optimal berproduksi. Dinata *et al.* (2018) menyatakan bahwa produksi rata-rata jeruk RGL di Kabupaten Lebong tidak mencapai setengah dari potensi produksinya karena penerapan teknologi budidaya (pemangkasan, pemupukan, dan pengendalian OPT) yang tidak intensif, padahal luas kebun rata-rata petani hanya 1,2 ha. Permasalahan dalam penerapan teknologi tersebut adalah kemampuan petani dalam manajemen usahatani masih rendah terutama dalam penyediaan permodalan usaha.

Petani jeruk di Desa Pal 7 memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan usahatani jeruk RGL berdasarkan karakteristik umur petani dan luas lahan yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi, keinginan untuk mengembangkan jeruk ini perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan agribisnis di tingkat petani untuk memperkuat posisi tawar petani dalam sistem agribisnis jeruk. Penumbuhan koperasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat posisi tawar petani tersebut dengan memanfaatkan nilai-nilai kebersamaan (kolektivitas) yang ada di dalam masyarakat.

Respons Petani Jeruk terhadap Penumbuhan Koperasi dan Karakteristik Petani yang mempengaruhinya

Sosialisasi atau penyuluhan tentang koperasi dilakukan sebelum survei. Hasil survei menunjukkan bahwa petani jeruk di Desa Pal 7 memiliki respons yang baik terhadap penumbuhan koperasi, kecuali terhadap keanggotaan

koperasi. Petani tidak menginginkan anggota koperasi yang berasal dari luar Desa Pal 7 (Tabel 3).

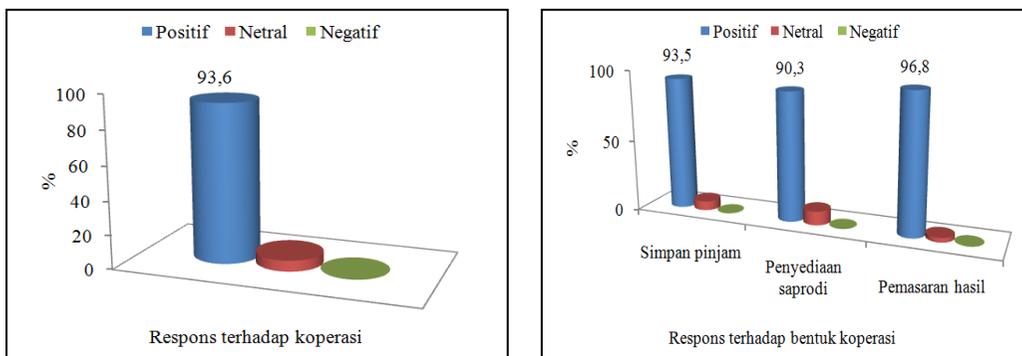
Tabel 3. Respons petani jeruk di Desa Pal 7 terhadap penumbuhan koperasi.

No	Pernyataan	Respons petani (%)				
		SS	S	R	TS	STS
1.	Koperasi dibutuhkan petani	74,2	19,4	6,5	0,0	0,0
2.	Bentuk koperasi simpan pinjam	45,2	48,4	6,5	0,0	0,0
3.	Bentuk koperasi penyediaan saprodi	51,6	38,7	9,7	0,0	0,0
4.	Bentuk koperasi pemasaran hasil	54,8	41,9	3,2	0,0	0,0
5.	Anggota koperasi satu kelompok tani	41,9	41,9	12,9	3,2	0,0
6.	Anggota koperasi satu desa	29,0	58,1	12,9	0,0	0,0
7.	Anggota koperasi lintas desa	19,4	12,9	38,7	29,0	0,0
8.	Pembentukan koperasi pada tahun ini	51,6	38,7	9,7	0,0	0,0
9.	Pelayanan koperasi setiap hari	41,9	45,2	6,5	3,2	3,2
10.	Pelayanan koperasi setiap minggu	16,1	35,5	25,8	19,4	3,2
11.	Pelayanan koperasi setiap bulan	22,6	25,8	19,4	29,0	3,2
12.	Perlu adanya kantor koperasi	54,8	32,3	9,7	3,2	0,0
13.	Perlu manajer koperasi	48,4	38,7	12,9	0,0	0,0

*keterangan : SS:Sangat setuju; S=setuju; R=Ragu-ragu; TS=Tidak Setuju; STS=Sangat Tidak Setuju

Sumber : Hasil survei terhadap 31 orang petani.

Respons petani pada Tabel 3 jika disederhanakan maka akan diperoleh tiga kelompok respons yaitu respons positif (jawaban sangat setuju dan setuju), respons netral (jawaban ragu-ragu), dan respons negatif (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Ilustrasi respons petani selanjutnya ditampilkan pada Gambar 4 yang menunjukkan bahwa 93,6% responden merespons positif penumbuhan koperasi petani jeruk di Desa Pal 7. Petani menginginkan bahwa kehadiran koperasi akan membantu kegiatan agribisnis jeruk.



a. Terhadap Penumbuhan koperasi.

b. Terhadap Bentuk koperasi.

Gambar 4. Respons petani jeruk di Desa Pal 7

Respons petani jeruk di Desa Pal 7 terhadap pembentukan koperasi yang sangat baik itu karena mereka membutuhkan kelembagaan ekonomi yang dapat menjadi sumber permodalan, mempermudah penyediaan sarana produksi (saprodi), dan meningkatkan daya tawar petani dalam pemasaran hasil (Gambar 4). Keberadaan koperasi diharapkan memungkinkan petani secara kolektif menyediakan saprodi untuk efisiensi biaya dan memasarkan hasil panen untuk memperbesar perolehan margin.

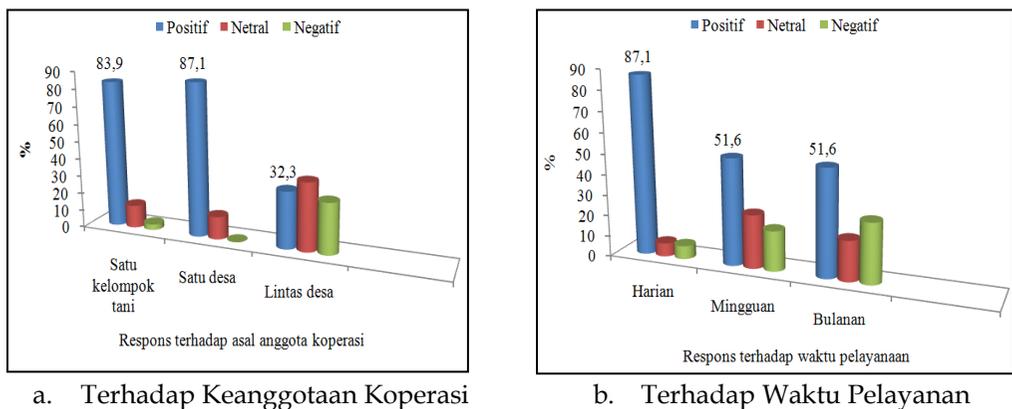
Pengadaan kebutuhan saprodi yang dilakukan dalam jumlah besar seperti pupuk dan kapur pertanian secara kolektif untuk anggota koperasi lebih murah karena dapat diadakan langsung oleh distributor. Selain itu, hasil panen dijual lewat koperasi dengan harga yang seragam berdasarkan kualitas buah setelah proses *grading* sehingga petani mampu meningkatkan posisi tawar karena harga tidak dapat dipermainkan oleh pedagang pengumpul. Keuntungan lain adalah koperasi dapat melakukan kerjasama pemasaran langsung ke konsumen yang menginginkan volume produksi dalam jumlah besar secara kontinu dengan kualitas buah yang baik. Pemenuhan permintaan pasar yang tidak dapat dilakukan melalui pemasaran secara individual, dapat diwujudkan melalui pemasaran kolektif (satu pintu) melalui koperasi. Efisiensi biaya produksi dan peningkatan margin pemasaran yang diperoleh petani akan mengembangkan potensi agribisnis (Ngadi, 2013).

Pemasaran satu pintu dapat disinergikan dengan usaha simpan pinjam koperasi. Petani anggota tidak lagi kesulitan untuk memperoleh modal usaha karena dapat meminjam dari koperasi dengan jaminan penjualan buah jeruk lewat koperasi. Koperasi mendapatkan keuntungan dari relasi usaha dengan anggota (simpan pinjam, pengadaan saprodi, dan pemasaran hasil). Keuntungan tersebut sebagian akan dibagikan kepada anggota saat pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang akan dilakukan setiap tahun.

Koperasi yang dibentuk harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Aturan

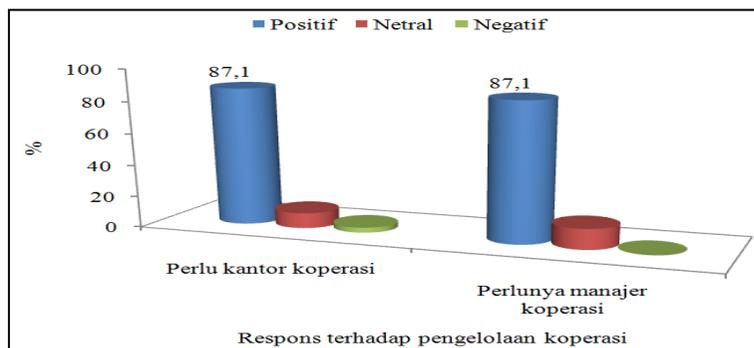
Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Bentuk koperasi yang cocok di Desa Pal 7 adalah koperasi primer yang anggotanya adalah individu-individu petani. Jenis koperasinya adalah koperasi produsen yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan anggota kepada masyarakat.

Petani menginginkan agar anggota koperasi berasal dari satu kelompok tani atau satu desa untuk mempermudah pengelolaan koperasi dalam melayani anggota (Gambar 5a). Pelayanan koperasi kepada petani jeruk juga dapat dilakukan kepada petani dari luar Desa Pal 7 secara terbatas meskipun mereka tidak masuk sebagai anggota koperasi.



Gambar 5. Respons petani jeruk di Desa Pal 7

Petani lebih menginginkan agar koperasi melakukan pelayanan harian daripada mingguan atau bulanan untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan saprodi dan mempermudah pemasaran jeruk hasil panen anggota (Gambar 5 b.). Oleh karena itu koperasi perlu memiliki kantor dan manajer untuk mendukung pengelolaan koperasi (Gambar 8).



Gambar 6. Respons petani terhadap pengelolaan koperasi.

Penjelasan Gambar 4 sampai dengan Gambar 6 menunjukkan bahwa respons petani jeruk di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya sebagai kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong terhadap koperasi adalah positif. Respons yang baik ini akan memudahkan pengorganisasian petani dalam pembentukan koperasi.

Respons petani yang baik terhadap koperasi muncul karena adanya kebutuhan bersama untuk mengembangkan kelembagaan agribisnis petani untuk meningkatkan daya tawar. Kebersamaan, kontinuitas pelayanan, dan luasnya cakupan pelayanan koperasi merupakan tiga hal yang direspons positif oleh petani ketika ingin menumbuhkan koperasi.

Kebersamaan akan mendatangkan persatuan anggota. Tidak mengherankan jika petani kurang merespons anggota yang berasal dari luar desa. Kontinuitas dan luasnya cakupan pelayanan koperasi lebih disetujui petani karena akan memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan usahatani jeruk. Petani menginginkan agar pelayanan koperasi dilakukan setiap hari sehingga diperlukan adanya seorang manajer yang benar-benar mengurus koperasi dalam melayani anggota. Kinerja koperasi memang ditunjukkan dengan kemampuannya melayani anggota.

Hasil uji korelasi antara variabel respons petani jeruk terhadap pembentukan koperasi dengan karakteristik petani di Desa Pal 7 ditampilkan pada Tabel 4 dimana ditunjukkan bahwa respons petani jeruk terhadap pembentukan koperasi berhubungan positif dengan umur dan luas kepemilikan kebun dan sebaliknya berhubungan negatif dengan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan jumlah tanggungan keluarga. Namun secara statistik, hanya luas kepemilikan kebun yang memiliki nilai korelasi yang signifikan terhadap respons petani terhadap koperasi.

Semakin luas kepemilikan kebun, maka diduga semakin positif pula keinginan petani berkoperasi. Kesimpulan ini menyiratkan bahwa petani yang memiliki kebun relatif luas menginginkan adanya suatu organisasi ekonomi yang dapat meningkatkan daya tawar petani dalam sistem agribisnis jeruk di Desa Pal 7.

Tabel 4. Hasil uji korelasi antara variabel respons petani jeruk terhadap pembentukan koperasi dengan karakteristik petani.

No	Korelasi antar variabel	Nilai Korelasi Rank Spearman	Probabilitas Korelasi
1.	Respons petani dengan umur	0,064	0,734
2.	Respons petani dengan pendidikan formal	-0,064	0,733
3.	Respons petani dengan	-0,103	0,582

pendidikan non formal		
4. Respons petani dengan jumlah tanggungan keluarga	-0,306	0,094
5. Respons petani dengan luas kepemilikan kebun	0,364*	0,044

Keterangan: r-tabel (n = 31) pada level 5% = $\pm 0,355$ (uji 2 arah); * berbeda nyata.

Tabel 4 menunjukkan bahwa respons petani jeruk terhadap pembentukan koperasi berhubungan positif dengan umur dan luas kepemilikan kebun dan sebaliknya berhubungan negatif dengan pendidikan formal, pendidikan non formal, dan jumlah tanggungan keluarga. Namun secara statistik, hanya luas kepemilikan kebun yang memiliki nilai korelasi yang signifikan terhadap respons petani terhadap koperasi. Semakin luas kepemilikan kebun, maka diduga semakin positif pula keinginan petani berkoperasi. Kesimpulan ini menyiratkan bahwa petani yang memiliki kebun relatif luas menginginkan adanya suatu organisasi ekonomi yang dapat meningkatkan daya tawar petani dalam sistem agribisnis jeruk di Desa Pal 7.

Respons petani yang baik terhadap penumbuhan koperasi tidak lepas dari rendahnya produktivitas tanaman jeruk di Desa Pal 7. Hasil kajian Sastro *et al.* (2019) menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas jeruk di Desa Pal 7 adalah 7,2 ton/ha, jauh di bawah potensinya yang berkisar antara 25-40 ton/ha (Supriyanto *et al.*, 2010). Rendahnya produktivitas tanaman jeruk tersebut disebabkan oleh penerapan teknologi budidaya yang belum sesuai anjuran (Iswari *et al.*, 2008). Padahal komponen teknologi budidaya jeruk harus dilakukan serentak pada seluruh kawasan pengembangan agribisnis jeruk untuk mencegah terjadinya kerusakan kawasan akibat serangan hama penyakit (Supriyanto *et al.*, 2010).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan kebun berpengaruh positif terhadap produksi dan pendapatan petani jeruk (Seran dan Kune, 2016; Hadi, 2017). Namun dari hasil penelitian ini, pengelolaan kebun menjadi kunci peningkatan produktivitas tanaman. Petani di Desa Pal 7 cenderung melakukan perluasan kebun tanpa memperhatikan penerapan teknologi budidaya yang berakibat negatif pada berkembangnya hama dan penyakit tanaman. Gugur buah yang disebabkan oleh serangan hama lalat buah dan penggerek buah sangat merugikan petani jeruk di Desa Pal 7. Petani kewalahan untuk mengatasinya secara individu dan dapat menyebabkan kehilangan hasil 30-100%.

Adanya koperasi petani diharapkan dapat mengatasi secara bersama serangan hama dan penyakit tanaman untuk menekan kehilangan hasil, sekaligus meningkatkan produktivitas jeruk dan pendapatan petani.

Penumbuhan koperasi petani jeruk di Desa Pal 7 oleh karena itu direspons dengan baik terutama oleh petani yang memiliki lahan yang relatif luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kawasan pengembangan jeruk di Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60. II Tahun 2018 yang telah memenuhi ketentuan Permentan 18/2018 hanya ada di Desa Pal 7, Kecamatan Bermani Ulu Raya. Respons petani jeruk di Desa Pal 7 terhadap penumbuhan koperasi adalah positif sehingga mendukung pendirian koperasi petani jeruk di desa ini. Respons tersebut secara signifikan berhubungan positif dengan luas kepemilikan kebun.

Saran

Keberhasilan koperasi petani jeruk akan ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya karena adanya partisipasi anggota. Partisipasi anggota yang baik hanya terjadi jika mereka merasakan pentingnya keberadaan koperasi dalam mendukung usahataniya. Oleh karena itu, disarankan agar dalam pembentukan koperasi sebaiknya petani yang memiliki kebun jeruk yang relatif luas lebih diutamakan sebagai anggota karena mereka memiliki kepentingan yang lebih besar akan pelayanan koperasi sehingga mendorong partisipasinya. Penumbuhan koperasi petani diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan petani melalui penerapan teknologi dalam kawasan pengembangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia D, Kusnadi N, Harianto. 2017. Studi empiris perilaku usaha koperasi pertanian: kasus koperasi di Dataran Tinggi Gayo, Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*. 14(1):12-21.
- Aini AN, Syaukat Y, Rifin A. 2016. Peranan koperasi terhadap penurunan biaya transaksi usaha ternak sapi perah di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Agro Ekonomi*. 34(2):123-133.
- Ariningsih E. 2013. Skala ekonomi koperasi tebu di Jawa Timur dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Agro Ekonomi*. 31(1):53-69.
- _____. 2014. Dampak keanggotaan koperasi terhadap pendapatan petani tebu di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*. 32(2):147-165.
- BPS Kabupaten Rejang Lebong. 2017. *Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Curup.

- Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Dinata K, Hartono R, Mikasari W, Ishak A, Musaddad D. 2018. Penerapan teknologi budidaya jeruk keprok varietas RGL dan respons petani terhadap teknologi pembuahan berjenjang sepanjang tahun (bujangseta) di Kabupaten Lebong. *Bunga Rampai Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi* 2018. IAARD Press. Jakarta. Hlm. 469-483.
- Ellyta. 2017. Jaringan komunikasi petani dalam pemasaran lidah buaya di Kalimantan Barat. *ZIRAA'AH*. 42(1):30-39.
- Fatimah, Darna. 2014. Peranan koperasi dalam mendukung permodalan usaha kecil dan mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 10(2):127-138.
- Patricia RS, Sari LN. 2018. Strategi pemasaran Koperasi Bina Usaha Al-Ihsan. *Jurnal Digest Marketing*. 3(1):67-78.
- Fitriani. 2015. Penguatan kapasitas kelembagaan gapoktan melalui pembentukan koperasi pertanian. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 28(2):63-69.
- Hadi S. 2017. Faktor sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap produksi dan keuntungan usahatani buah jeruk manis dan naga di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Saintek*. 14(2):97-105.
- Ishak A, Firison J, Harwanto. 2017. Keberlanjutan pola penggaduhan ternak sapi potong pada tingkat kelompok tani di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner Tahun 2017*. IAARD Press. Jakarta. Hlm. 209-218.
- Iswari D, Sutjahjo SH, Poerwanto R, Setia AK, Bey A. 2008. Indeks keberlanjutan pengembangan kawasan sentra produksi jeruk berkelanjutan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. *J. Hort*. 18(3):348-359.
- Kemenkop dan UKM. 2017. *Tak Mudah Mengawasi Sepak Terjang Koperasi*. Majalah Cooperative Nomor 1 – Maret 2017. Hlm. 11.
- Kementan. 2012. *Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2280/Kpts/SR.120/6/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2018a. *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani*. Berita Negara Republik Indonesia No. 559 Tahun 2018. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2018b. *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional*. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Listyati D, Wahyudi A, Hasibuan AM. 2014. Penguatan kelembagaan untuk peningkatan posisi tawar petani dalam sistem pemasaran kakao. *J-TIDP*. 1(1):15-28.

- Mardikanto, T. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Ngadi. 2013. Pemberdayaan petani di kawasan Subak Guama dan Jatiluwih, Kabupaten Tabanan Bali. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 11(2):149-162.
- Pemkab Rejang Lebong. 2018. *Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.60. II Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan Wilayah Pengembangan Komoditi Jeruk Siam dan Jeruk Keprok Sub Sektor Hortikultura di Kabupaten Rejang Lebong*. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Curup.
- Pratama L, Hubeis AVS, Pandjaitan NH. 2017. Analisis tingkat kepuasan anggota dan strategi pengembangan koperasi (studi kasus Koperasi Kredit Sehati Jakarta). *Manajemen IKM*. 12(1):104-115.
- Rangkuti PA. 2010. Peran komunikasi dalam modernisasi pertanian berbasis koperasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 8(1):42-57.
- Rusli S. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. LP3ES. Jakarta.
- Sastro Y, Ishak A, Musaddad D, Fauzi E, Astuti HB, Ramon E, Sudarmansyah, Silviyani E, Efendi R, Suardi. 2019. *Laporan Akhir Analisis Kebijakan Peningkatan Produksi Pangan Strategis*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bengkulu.
- Seran ND, Kune SJ. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani jeruk keprok di Desa Suanae Kecamatan Miamaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Agrimor*. 1(3):67-69.
- Sudarwati. 2016. *Analisis Kinerja Pendidikan Provinsi Bengkulu*. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Supriyanto A, Dwiastuti ME, Triwiratno A, Endarto O, Suhariyono. 2010. *Panduan Teknis Pengelolaan Jeruk Sehat – Strategi Pengendalian Penyakit CVPD*. Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Malang.
- Susilowati SH. 2016. Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 34(1):35-55.
- Sulaiman AI, Masrukin M, Chusmeru C, Pangestuti S. 2016. Pemberdayaan koperasi pondok pesantren sebagai pendidikan sosial dan ekonomi santri. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 3(2):109-121.
- Susilo E. 2013. Peran koperasi agribisnis dalam ketahanan pangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. 10(1):95-104.
- Widjajani S, Hidayati SN. 2014. Membangun koperasi pertanian berbasis anggota di era globalisasi. *Jurnal Maksipreneur*. 4(1):98-115.
- Zain MA. 2015. Politik hukum koperasi di Indonesia (tinjauan yuridis historis pengaturan perkoperasian di Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum*. 2(3):160-177.